



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun 2018



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik merupakan pertanggung jawaban kinerja Perangkat Daerah urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. LKjIP ini berisikan tentang Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta tinjauan secara umum tentang keberhasilan ataupun kegagalan, permasalahan dan kendala utama, serta strategi pemecahan masalah sebagai bahan rencana yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh berbagai faktor keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian diharapkan bahwa LKjIP tahun 2018 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Muara Beliti, 28 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS



MUHAMMAD ROZAK, SE
Pembina
NIP. 19720606 200501 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Landasan ukum	2
D. Sistematika	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Tugas Pokok dan Fungsi	6
G. Kondisi Pegawai	11
H. Aset/Modal	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021.....	15
B. Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2018	17
C. Alokasi Anggaran.....	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	29
C. Realisasi Anggaran	34
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Langkah Perbaikan dalam Rangka Peningkatn Kinerja Pada Tahun Mendatang	37

DAFTAR TABEL

1. SDM Menurut Golongan	12
2. SDM Menurut Jabatan.....	12
3. SDM Menurut Pendidikan.....	12
4. Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Gol	13
5. Aset Diskominfo dan Statistik	13
6. Sasaran Strategis – Indikator Kinerja	16
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	17
8. Alokasi Anggaran .per Program.....	18
9. Alokasi Anggaran per Sasaran.....	18
10. Alokasi Anggaran Tahun 2018	19
11. Capaian Kinerja Tahun 2018	23
12. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun sebelumnya	25
13. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2018	27

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Diskominfo dan Statistik	6
---	---

IKHTISAR EKSEKUTIF

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang populer disebut *e-government*. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas merupakan Dinas teknis penyelenggara urusan Komunikasi Informatika dan Statistik, yang mendukung misi Bupati untuk “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima”.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 181,9% dari target yang telah ditetapkan. Sebanyak 8 indikator kinerja dari 5 sasaran strategis, sebanyak 6 indikator dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya mencapai 100%, 2 indikator dinyatakan tidak berhasil. Indikator yang tidak berhasil adalah terkait target penuntasan blank spot area dan penerapan *e-government* pada penyelenggaraan pemerintah. Ketidak berhasilan pencapaian target penuntasan blank spot area dikarenakan belum terealisasinya pembangunan menara telekomunikasi bantuan dari Kemenkominfo, sedangkan untuk penerapan *e-government* baru dapat direalisasikan 2 aplikasi *e-government*.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas, ke depan akan terus dilakukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi, baik di pusat maupun instansi di daerah dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator kinerja hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 8.959.120.000,- yang telah direalisasikan sebesar Rp. 8.648.870.574,- atau 96,54%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Proses tersebut, diperankan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (information of technology).

Pembentukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas. Melalui Peraturan Daerah dimaksud diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika, sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. E-Government di definisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan

teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja melalui proses penyusunan Rencana Kerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja :

1. Merupakan acuan dalam menyusun perencanaan kegiatan organisasi perangkat daerah pada tahun berikutnya.
2. Merupakan barometer/tolok ukur keberhasilan/kegagalan organisasi perangkat daerah dalam mengemban wewenang serta menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja :

1. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya.
2. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan atau kekurangan dalam pencapaian sasaran strategis Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

D. Sistematika

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas selama Tahun Anggaran 2018. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Adapun sistematika penyusunan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan terkait dengan pertanggung jawaban kinerja, terdiri dari :

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menjelaskan secara ringkas capaian indikator sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

c. Realisasi Anggaran

Menjelaskan secara ringkas realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

E. Struktur Organisasi

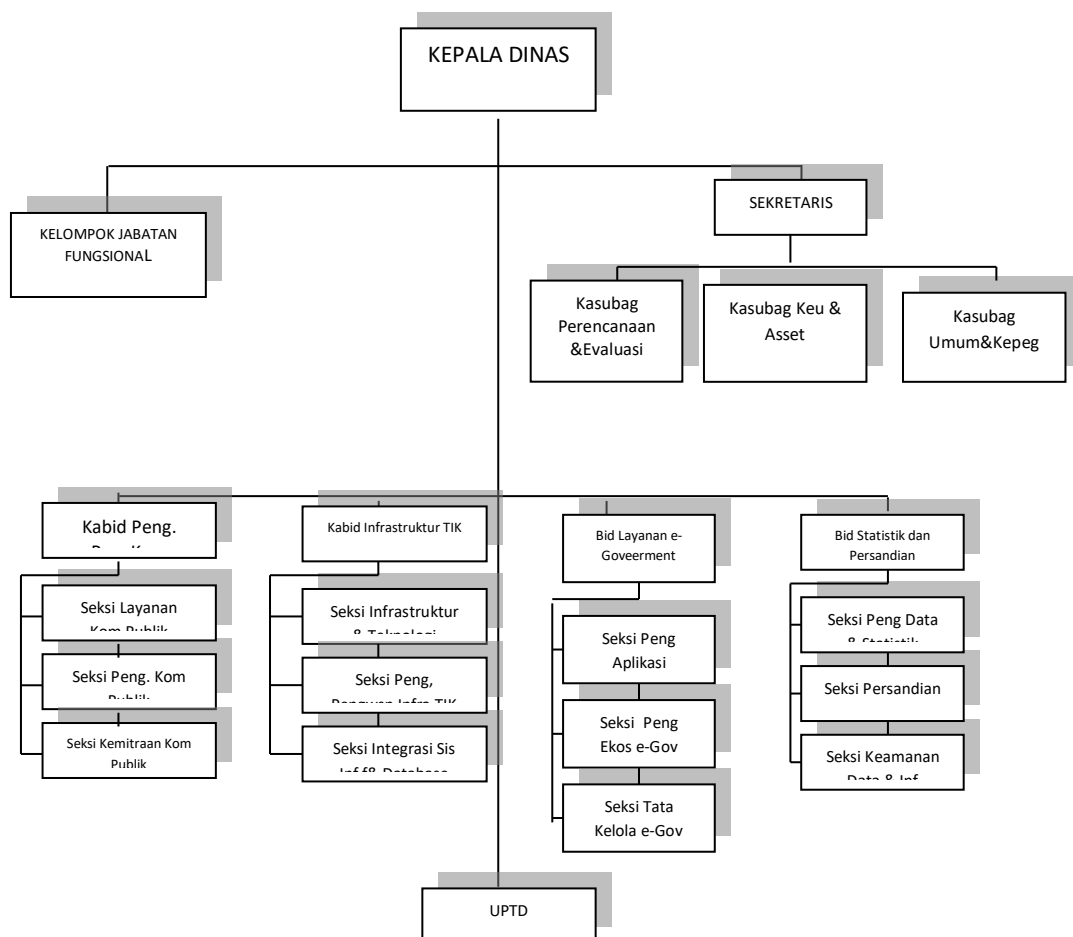
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas. Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. Seksi Layanan Komunikasi Publik
 - b. Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik
 - c. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terdiri dari :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengendalian, Pengawasan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - c. Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database
5. Bidang Layanan e-Government, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government
 - c. Seksi Tata Kelola e-Government
6. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik
 - b. Seksi Persandian
 - c. Seksi Keamanan Data dan Informasi

Struktur Organisasi sebagaimana gambar berikut :

Gambar : 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016



F. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Komunikasi Informatika dan Statistik
- b. Perumumusan kebijakan teknis dan operasional bidang Komunikasi Informatika dan Statistik
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Komunikasi Informatika dan Statistik.
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Komunikasi Informatika dan Statistik.
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan bidang Komunikasi Informatika dan Statistik.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi dan pembinaan penyusunan program dan kegiatan dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada sekretariat;
- b. Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan ketatalaksanaan, kedisiplinan dan perpustakaan dinas;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi dan media publik;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan komunikasi dan media publik;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi dan media publik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik.
- Kepala Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik.
- Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

3. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur TIK dan integrasi sistem informasi dan database;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur TIK dan integrasi sistem informasi dan database
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastuktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur TIK dan integrasi sistem informasi dan database
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur TIK dan integrasi sistem informasi dan database, dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- Kepala Seksi Pengendalian, Pengawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Kepala Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database

4. Bidang Layanan e-Government

Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan e-Government.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government.
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government
- e. Pelayanan filtering konten negatif
- f. Penetapan alokasi internet protocol dan numbering di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Layanan e-Government dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi;.
- Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
- Kepala Seksi Tata Kelola e-Government.

5. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik serta bidang persandian;
- b. Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang pengelolaan data dan statistik serta bidang persandian;
- c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan statistik serta bidang persandian;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik serta bidang persandian.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;.
- Kepala Seksi Persandian;
- Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi.

G. Kondisi Pegawai

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas saat ini memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

Tabel I. 1
SDM Menurut Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah Orang
I	-	-	-	-	-
II	1	2	1	1	5
III	3	4	7	9	23
IV	4	-	-	-	4
Jumlah ...					32

Sumber data: Sekretariat Diskominfo Statistik

2. Menurut Jabatan

Tabel I.2
SDM Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon IIb (Kepala SKPD)	-
2.	Esselon III a (Sekretaris)	1
3.	Esselon III b (Kabid)	4
4.	Esselon IVa (Kasi, KUPTD)	15
5.	Esselon IVb (TU UPTD)	-
6.	Fungsional	-
Jumlah		20

Sumber data : Sekretariat Diskominfo Statistik

3. Menurut Pendidikan

Tabel I.3
SDM Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-3	-
2.	S-2	4
3.	S-1 / D-IV	20
4.	D-III	2
5.	SLTA	6
6.	SLTP	-
Jumlah.....		32

Sumber data : Sekretariat Diskominfo Statistik

Tabel I. 4
Daftar Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Musi Rawas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan Tahun 2018

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Gol (orang)													Jlh (org)
	IV	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IIb	IIa	Id	Ic	Ib	Ia	
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S1/D4	3	7	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Akademi/DIII	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
SLTA	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	4	9	7	4	2	1	2	2	1	-	-	-	-	

Sumber data: DUK Diskominfo Statistik

H. Asset / Modal

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas didukung oleh sumber daya asset / modal yang tercatat pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel I.5
Aset Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

No	Asset	Jumlah Satuan	Kondisi
1.	Gedung dan Bangunan : - Gedung Kantor - Bangunan Menara	1 Unit 1 Unit	Baik Baik
2.	Kendaraan : - Roda 4 - Roda 2	4 Unit 10 Unit	Baik Baik
3.	Perlengkapan Barang Elektronik - Air Conditioner (AC) - Komputer PC - Komputer PC (e-voting) - Laptop - Notebook	11 Unit 3 Unit 8 Unit 11 Unit 2 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik

	<ul style="list-style-type: none"> - Printer - Scanner - Peralatan LPSE - Peralatan Radio/studio - Server - UPS 	10 Unit 1 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Unit 5 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik Baik
4	Perlengkapan Kantor <ul style="list-style-type: none"> - Meja Kerja - Kursi Kerja - Meja Rapat - Kursi Rapat - Kursi Tamu - Filling Cabinet - Lemari 	11 Unit 8 Unit 2 Set 1 Set 2 Unit 1 Unit 4 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Strategis Tahun 2016-2021

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas mendukung pencapaian misi Bupati Musi Rawas pada Misi 5 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Pelayanan Prima”. Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2016-2021 dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menetapkan visi : “Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Melalui Pemanfaatan Teknologi, Data, Informasi dan Komunikasi”.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang akan dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga memberikan arah sekaligus batasan pencapaian tujuan. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi
2. Mewujudkan pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis Teknologi Informasi.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi disemua lembaga pemerintah.
5. Memantapkan tata kelola data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menetapkan tujuan

dan sasaran strategis yang hendak dicapai. Adapun tujuan Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis TIK”

Guna memudahkan pengukuran dan evaluasi dalam pencapaian kinerja tujuan strategis dijabarkan menjadi beberapa sasaran strategis yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis – Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan komunikasi	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi
2	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerinthan	Nilai akuntabilitas kinerja OPD
		Persentase aset dalam kondisi baik
3	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian infrastruktur TIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terintegrasi jaringan internet
4	Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan e-government	Jumlah Aplikasi e-goverment yang diimplementasikan
5	Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis TIK	Persentase PPID OPD yang sesuai regulasi
6	Meningkatnya tata kelola data statistik daerah	Jumlah pengelolaan data statistik daerah
7	Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi di daerah	Persentase berita sandi yang diamankan

B. Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka perlu dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun pada awal tahun anggaran. Perjanjian Kinerja ini berupa target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2018
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	50 %
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	20%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola adminitrasi pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB
		Persentase aset dalam kondisi baik	90%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2018 tersebut diatas, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 8.959.120.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 35 Kegiatan yang termasuk dalam 10 program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran per Program

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.427.472.000,-	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.565.000.000,-	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	154.000.000,-	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.605.000,-	
5	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	4.380.315.000,-	
6	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	125.000.000,-	
7	Layanan e-Government	970.728.000,-	
8	Pengelolaan Komunikasi Publik	75.000.000,-	
9	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	128.000.000,-	
10	Keamanan Informasi dan Persandian	90.000.000,-	
	Total	8.959.120.000,-	

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Ket
1	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan komunikasi	125.000.000,-	
2	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	1.940.077.000,-	
3	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian infrastruktur TIK	2.695.315.000,-	
4	Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan e-government	970.728.000,-	
5	Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis TIK	3.010.000.000,-	
6	Meningkatnya tata kelola data statistik daerah	128.000.000,-	
7	Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi di daerah	90.000.000,-	
	Total	8.959.120.000,-	

C. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menurut Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) adalah sebesar Rp. 8.959.120.000,-. Anggaran tersebut terdiri atas 10 Program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Program Layanan e-Government, Program Pengelolaan Komunikasi Publik dan Program Keamanan Informasi dan Persandian, serta 35 Kegiatan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.272.000,-	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000,-	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	71.400.000,-	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	35.300.000,-	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.000.000,-	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,-	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000,-	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.320.000,-	

9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	20.000.000,-	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	490.000.000,-	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	50.000.000,-	
12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	106.680.000,-	
13	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	120.000.000,-	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	175.000.000,-	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	117.500.000,-	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22.500.000,-	
4	Pembangunan Gedung Media Center	1.250.000.000,-	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	129.000.000,-	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,-	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	43.605.000,-	
V	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		
1	Penyusunan Profil Daerah	78.000.000,-	
2	Penyusunan Statistik Sektorial Daerah	50.000.000,-	
VI	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1.215.315.000,-	
2	Optimalisasi Radio Darussalam	200.000.000,-	
3	Penyebarluasan Informasi	2.300.000.000,-	

	Pembangunan Daerah		
4	Analisis Media	100.00.000,-	
5	Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Menara Telekomunikasi	230.000.000,-	
6	Implementasi PPID	185.000.000,-	
7	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Darussalam	150.000.000,-	
VII	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		
1	Bimbingan Teknis dan Penerapan Aplikasi Administrasi Perkantoran Elektronik (siMAYA) bagi Perangkat Daerah	125.000.000,-	
VIII	Program Layanan e-Government		
1	Optimalisasi dan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	465.000.000,-	
2	Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelayanan Website Kab. Musi Rawas	100.000.000,-	
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Imigrasi	405.728.000,-	
IX	Program Pengelolaan Komunikasi Publik		
1	Penyediaan Video Profil Daerah Musi Rawas	75.000.000,-	
X	Program Keamanan Informasi dan Persandian		
1	Optimalisasi Pelaksanaan Sandi dan Telekomunikasi	90.000.000,-	
	Jumlah	8.959.120.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban yang diukur adalah program, kegiatan, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antara tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur melalui beberapa indikator kinerja. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 dapat dikatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 109,8% dari target yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis /Indikator Kinerja	Tahun 2018			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan komunikasi			76%	
	Indikator Kinerja :				
	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	50%	71%	142%	
	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	20%	0%	0%	
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan			50%	
	Indikator Kinerja :				
	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	-	-	
	Peresentase aset dalam kondisi baik	90%	90%	100%	
3.	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian infrastruktur TIK			140%	
	Indikator Kinerja :				
	Persentase organisasi perangkat daerah yang terintegrasi jaringan internet	50%	70%	140%	
4.	Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan e-government			100%	
	Indikator Kinerja :				
	Jumlah aplikasi e-government yang diimplementasikan	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	
5.	Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis TIK			133%	
	Indikator Kinerja :				
	Persentase PPID OPD yang sesuai regulasi	75 %	100%	133%	
6.	Meningkatnya tata kelola data statistik daerah			100%	
	Indikator Kinerja :				
	Jumlah pengelolaan data statistik daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
7.	Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi di daerah			170%	
	Indikator Kinerja :				
	Persentase berita sandi yang diamankan	50%	85%	170%	

Capaian Kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 109,8%

- a. Pada tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam pengimplementasian aplikasi pengaduan dan penyampaian aspirasi masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yaitu Aplikasi LAPOR SP4N. Pada tahun ini dilaksanakan pelatihan bagi petugas-petugas administrator dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada. Seiring dengan penerapan dan pengimplementasian aplikasi ini telah terdapat penyampaian aspirasi atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat yang ditujukan ke beberapa perangkat daerah. Dari sejumlah pengaduan yang masuk sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah terkait. Dari sebanyak 12 pengaduan yang masuk, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti yaitu sebanyak 7 pengaduan.
- b. Pada tahun 2018 belum dilakukan pengintegrasian sistem informasi dikarenakan Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sebagai organisasi perangkat daerah baru fokus untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan untuk pemenuhan jaringan internet untuk seluruh organisasi perangkat daerah.
- c. Penyediaan layanan akses internet kesetiap organisasi perangkat daerah dalam kabupaten Musi Rawas yang berada di Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti sudah terlayani seluruhnya, hanya organisasi perangkat daerah Kecamatan yang belum terlayani jaringan internet yang terintegrasi.
- d. Pelaksanaan dan penerapan e-goverment pada penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2018 yaitu aplikasi siMAYA, LAPOR SP4N dan Aplikasi e-PPID telah diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah.
- e. PPID Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 1 PPID Induk dan 49 PPID Pembantu, yaitu PPID seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang tugas dan tanggung jawab PPID Utama dan PPID Pembantu serta pelatihan Aplikasi SIP PPID untuk admin diseluruh organisasi perangkat daerah.

- f. Pada tahun anggaran 2018 Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menyusun dokumen statistik daerah yaitu : Musi Rawas Dalam Angka, PDRB dan Hand Book. Selain bekerjasama dengan BPS Diskominfo juga menyusun data statistik sektoral yang merupakan data-data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada dalam Kabupaten Musi Rawas.
- g. Tahun 2018 melalui bidang statistik dan persandian diselenggarakan penerimaan surat masuk dan pendistribusian surat melalui email Sanapati Persandian.

2. Capaian Kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun lalu

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis /Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Real	Capaian	Target	Real	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan komunikasi						
	Indikator Kinerja :						
	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	50%	71%	142%
	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	10%	-	-	20%	-	-
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan						
	Indikator Kinerja :						
	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	100%	BB	-	-
	Persentase aset dalam kondisi baik	80%	80%	100%	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian infrastruktur TIK						
	Indikator Kinerja :						
	Persentase organisasi perangkat daerah yang terintegrasi jaringan internet	40%	50%	125%	50 %	70%	140%
4.	Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan e-goverment						
	Indikator Kinerja :						
	Jumlah aplikasi e-goverment yang diimplementasikan	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%

5.	Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis TIK						
	Indikator Kinerja :						
	Persentase PPID OPD yang sesuai regulasi	50%	75%	150%	75%	100%	133%
6.	Meningkatnya tata kelola data statistik daerah						
	Indikator Kinerja :						
	Jumlah pengelolaan data statistik daerah	4 Doku men	4 Doku men	100%	4 Doku men	4 Doku men	100%
7.	Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi di daerah						
	Indikator Kinerja :						
	Persentase berita sandi yang diamankan	40%	75%	187,5 %	50%	85%	170%

- a. Aplikasi LAPOR SP4N pada tahun 2017 baru pada tahap penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta koordinasi dan konsultasi, baik ke Provinsi maupun pusat tentang pelaksanaan dan penerapan aplikasi ini di daerah.
- b. Pada tahun 2017 dan 2018 belum dilakukan pengintegrasian sistem informasi dikarenakan Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sebagai organisasi perangkat daerah baru fokus untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan untuk pemenuhan jaringan internet untuk seluruh organisasi perangkat daerah.
- c. Penyediaan layanan akses internet kesetiap organisasi perangkat daerah dalam kabupaten Musi Rawas yang berada di Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti sudah terlayani seluruhnya.
- d. Pelaksanaan dan penerapan e-government pada penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2018 telah memasuki tahap pengimplementasian di organisasi perangkat daerah, sedangkan pada tahun 2017 masih melakukan tahap sosialisasi untuk masing-masing Aplikasi, yaitu aplikasi siMAYA dan LAPOR SP4N.
- e. Pada tahun anggaran 2017 pengimplementasian e-PPID baru pada tahap pelaksanaan sosialisasi secara umum kepada seluruh organisasi perangkat daerah, baru pada tahun 2018 dilakukan penyiapan aplikasi e-PPID dan dilakukan pelatihan bagi administrator dan petugas PPID yang ada diseluruh organisasi perangkat daerah.

- f. Pada tahun anggaran 2018 dan 2017 Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menyusun dokumen statistik daerah yaitu : Musi Rawas Dalam Angka, PDRB dan Hand Book. Selain bekerjasama dengan BPS Diskominfo juga menyusun data statistik sektoral yang merupakan data-data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada dalam Kabupaten Musi Rawas.
 - g. Tahun 2017 dan 2018 melalui bidang statistik dan persandian diselenggarakan penerimaan surat masuk dan pendistribusian surat melalui email Sanapati Persandian.
3. Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah

Tabel 3.3
Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis /Indikator Kinerja	Target dan Realisasi s/d Tahun 2018			
		Target 2018	Target 2021	Realisasi s/d 2018	Capaian s/d 2018
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan komunikasi				
	Indikator Kinerja :				
	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	50%	100%	71%	71%
	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	20%	70%	0%	0%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan				
	Indikator Kinerja :				
	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	BB	-	-
	Persentase aset dalam kondisi baik	90%	100%	90%	90%
3.	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian infrastruktur TIK				
	Indikator Kinerja :				
	Persentase OPD yang terintegrasi jaringan internet	50%	70%	70%	140 %
4.	Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan e-goverment				
	Indikator Kinerja :				
	Jumlah aplikasi e-goverment yang diimplementasikan	3 Aplikasi	10 Aplikasi	3 Aplikasi	30%
5.	Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis TIK				

	Indikator Kinerja :				
	Persentase PPID OPD yang sesuai regulasi	75%	100%	133%	133%
6.	Meningkatnya tata kelola data statistik daerah				
	Indikator Kinerja :				
	Jumlah pengelolaan data statistik daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80%
7.	Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi di daerah				
	Indikator Kinerja :				
	Persentase berita sandi yang diamankan	50%	80%	85%	106,25%

- a. Pada tahun 2021 diharapkan 100% pengaduan ataupun penyampaian informasi kepada pemerintah daerah yang disampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi LAPOR SP4N dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang terkait, dan tindaklanjut serta penyelesaian yang dilakukan juga diharapkan dapat memberikan hal positif bagi masyarakat.
- b. Sampai dengan tahun 2018 belum dilakukan pengintegrasian sistem informasi dikarenakan Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sebagai organisasi perangkat daerah baru fokus untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan untuk pemenuhan jaringan internet untuk seluruh organisasi perangkat daerah. Namun demikian pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan akhir periode kepemimpinan Kepala Daerah target sasaran pengintegrasian sistem informasi dapat dicapai sesuai target.
- c. Penyediaan layanan akses internet kesetiap organisasi perangkat daerah dalam kabupaten Musi Rawas yang berada di Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Muara Beliti sudah terlayani seluruhnya dan diharapkan layanan akses internet ini juga akan sampai ke kecamatan-kecamatan.
- d. Pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan dan penerapan e-government belum signifikan, karena sampai dengan tahun 2018 baru tiga aplikasi generik pemerintah yang diterapkan di Pemkab Musi Rawas, yaitu aplikasi siMAYA, e-PPID dan LAPOR SP4N..

- e. Pada tahun anggaran 2018 dilakukan penyiapan aplikasi e-PPID dan dilakukan pelatihan bagi administrator dan petugas PPID yang ada diseluruh organisasi perangkat daerah. Seluruh PPID OPD sudah memiliki regulasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PPID.
- f. Sampai dengan akhir 2018 Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menyusun dokumen statistik daerah yaitu : Musi Rawas Dalam Angka, PDRB dan Hand Book. Selain bekerjasama dengan BPS Diskominfo juga menyusun data statistik sektoral yang merupakan data-data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada dalam Kabupaten Musi Rawas.
- g. Sampai dengan akhir tahun 2018 melalui bidang statistik dan persandian diselenggarakan penerimaan surat masuk dan pendistribusian surat melalui email Sanapati Persandian.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan komunikasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2021)	Realisasi 2018	Tingkat Capaian Renstra
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan komunikasi	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	71%	71%
	Persentase sistem informasi yang terintegrasi	70%	0%	0%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Pada tahun 2021 diharapkan 100% pengaduan ataupun penyampaian informasi kepada pemerintah daerah yang disampaikan oleh masyarakat

melalui aplikasi LAPOR SP4N dapat ditinjaulanjuti dan diselesaikan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang terkait, dan tindaklanjut serta penyelesaian yang dilakukan juga diharapkan dapat memberikan hal positif bagi masyarakat.

2. Sampai dengan tahun 2018 belum dilakukan pengintegrasian sistem informasi dikarenakan Diskominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sebagai organisasi perangkat daerah baru fokus untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan untuk pemenuhan jaringan internet untuk seluruh organisasi perangkat daerah. Namun demikian pada tahun anggaran berikutnya sampai dengan akhir periode kepemimpinan Kepala Daerah target sasaran pengintegrasian sistem informasi dapat dicapai sesuai target.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Capaian Renstra
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB	-	-
	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	90 %	90%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Nilai akuntabilitas kinerja baik, dikarenakan dukungan dari Pimpinan dan seluruh aparatur yang ada dalam penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.
2. Jumlah aset dalam kondisi baik cukup besar dikarenakan adanya kesadaran dari semua aparatur untuk menjaga setiap aset yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas, serta adanya penganggaran belanja pemeliharaan yang digunakan untuk memelihara jika ada aset yang mengalami kerusakan-kerusakan ringan yang diakibatkan karena kondisi usia aset bersangkutan, serta pemeliharaan-pemeliharaan rutin yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset agar tetap baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya pengembangan dan pengendalian infrastruktur TIK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2018	Tingkat Capaian Renstra
Meningkatnya pengembangan dan pengendalian infrastruktur TIK	Persentase organisasi perangkat daerah yang terintegrasi jaringan internet	70%	70 %	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Adanya kerjasama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dengan pihak penyedia (PT. Telkom) untuk pembangunan infrastruktur pendukung koneksi.
2. Adanya kerjasama antara OPD pengguna dan Diskominfo dan Statistik dalam penanganan troubleshooting.
3. Anggaran penyediaan bandwidth sudah terpusat di Dinas Kominfo, sehingga untuk pendistribusian dan kontrol kebutuhan internet ke seluruh OPD dalam lingkup Perkantoran Pemkab Musi Rawas sudah dapat dipenuhi.
4. Adanya kebutuhan dan dorongan untuk merubah pola pikir guna meningkatkan kinerja terutama untuk pelayanan publik.

Sasaran 4 : Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan e-government

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2018	Tingkat Capaian Renstra
Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan e-government	Jumlah Aplikasi e-government yang diimplementasikan	10 Aplikasi	3 Aplikasi	30%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Aplikasi generik pemerintah yang sudah diimplementasikan sampai dengan tahun anggaran 2018 adalah Administrasi Perkantoran Elektronik (siMAYA), Aplikasi LAPOR SP4N dan Aplikasi e-PPID. Penerapan ketiga aplikasi ini sudah dilaksanakan di seluruh organisasi perangkat daerah termasuk organisasi perangkat daerah kecamatan.
3. Pencapaian target akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021 diharapkan dapat diimplementasikan seluruhnya.

Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis TIK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Capaian Renstra
Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis TIK	Persentase PPID OPD yang sesuai regulasi	100%	133%	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Jumlah PPID yang ada yaitu 1 (satu) PPID Utama dan 49 (empat puluh sembilan) PPID Pembantu. Dari 50 PPID yang ada semuanya sudah memiliki regulasi tentang pembentukan dan susunan pengelola PPID.

Sasaran 6 : Meningkatnya tata kelola data statistik daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Capaian Renstra
Meningkatnya tata kelola data statistik daerah	Jumlah pengelolaan data statistik daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	80%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Dokumen statistik daerah yang disusun sampai dengan tahun 2018 terdiri dari Musi Rawas Dalam Angka, Dokumen PDRB dan Dokumen Statistik Sektorial Daerah.
3. Penyusunan dokumen statistik yang belum dilakukan oleh Diskominfo dan Statistik adalah Penyusunan Profil SUSEDA, dikarenakan penyusunan dokumen tersebut masih dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang lain dan belum dikembalikan ke Diskominfo dan Statistik.

Sasaran 7 : Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi di daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	Tingkat Capaian Renstra
Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi di daerah	Persentase berita sandi yang diamankan	80%	85%	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi dan efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 0,5%.

C. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.959.120.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 8.648.870.574,- atau sebesar 96,54%. Dengan rincian per program dan sasaran strategis sebagai berikut :

No	Program/Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	%
1.	Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi			
	a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	2.935.000.000	2.825.993.849	96,28
	b. Program Layanan e-Government	100.000.000	99.477.000	99,47
	c. Program Pengelolaan Komunikasi Publik	75.000.000	75.000.000	100
2.	Meningkatnya cakupan layanan e-government yang meliputi government to government, government to bisnis dan government to citizen			
	a. Program Layanan e-Government	995.728.000	969.683.792	97,38
	b. Program Administrasi Perkantoran	3.190.077.000	3.063.611.133	96,03
3.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi			
	a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.445.315.000	1.401.541.800	96,97
4.	Meningkatnya tata kelola data statistik daerah			
	a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	128.000.000	127.475.000	99,58

5.	Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah			
	a. Program Keamanan Informasi dan Persandian	90.000.000	86.088.000	95,65
	Total	8.959.120.000	8.648.870.574	96,54

Efektifitas penggunaan dana

Dibandingkan dengan kinerja yang dicapai tahun 2018 maka realisasi anggaran sebesar 96,54% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 109,8% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas disusun dalam rangka pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah. Laporan Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan transparansi dalam setiap gerak dan aktivitas pembangunan guna menciptakan Good Governance.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 secara umum untuk penyerapan anggaran sebesar 96,54 %.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2018 adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Selain itu, walaupun secara kuantitas terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2018.

B. Langkah Perbaikan dalam rangka Peningkatan Kinerja pada Tahun Mendatang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah antara lain :

1. Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi di beberapa Perangkat Daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan media-media penyebaran informasi
3. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur dalam pemahaman dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan tugas.

Beberapa langkah strategis yang sekarang telah dilakukan dan akan terus dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas pada tahun-tahun mendatang antara lain adalah :

1. Perlunya menyusun Master Plan pelaksanaan e-Government dan Master Plan Jaringan Telekomunikasi (Cell Plan).
2. Perlunya peningkatan kerjasama dengan operator telekomunikasi untuk mengatasi permasalahan layanan telekomunikasi di daerah.
3. Membuat dan menyempurnakan Standar Pelayanan Prosedur pemanfaatan media-media penyebaran informasi.

Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Muara Beliti, 28 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS



MUHAMMAD ROZAK, SE
Pembina
NIP. 19720606 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Jl. Sulaiman Amin

MUARABELITI

www.musirawaskab.go.id

e-mail : diskominfo.mura@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ROZAK, SE

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Musi Rawas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. HENDRA GUNAWAN

Jabatan : BUPATI MUSI RAWAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Beliti,

2018

Pihak Kedua


H. HENDRA GUNAWAN

Pihak Pertama


MUHAMMAD ROZAK, SE
Pembina
NIP. 19720606 200501 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	50
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	20
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	-	BB
		Persentase aset dalam kondisi baik	%	90%

Program :	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.427.472.000,-	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.565.000.000,-	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	154.000.000,-	APBD
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.605.000,-	APBD
5. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	128.000.000,-	APBD
6. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.380.315.000,-	APBD
7. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	125.000.000,-	APBD
8. Layanan e-Government	970.728.000,-	APBD
9. Pengelolaan Komunikasi Publik	75.000.000,-	APBD
10. Keamanan Informasi dan Persandian	90.000.000,-	APBD
	<u>8.959.120.000,-</u>	

Muara Beliti, 2018


BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN


PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS

MUHAMMAD ROZAK, SE
Pembina
NIP. 19720606 200501 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Jl. Sulaiman Amin Telp. (0733) 451788

MUARABELITI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 102 /KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2018 merupakan dokumen evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa pembentukan Tim Penyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan mengevaluasi data untuk disusun dan selaras dalam rangka mengukur kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 melalui anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 10 Desember 2018



**PIK KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS**

MUHAMMAD ROZAK, SE
Pembina
NIP. 19720606 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 107/KPTS/DISKOMINFO/2018
Tanggal : 10 Desember 2018

TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2018

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
2.	Ketua	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	
3.	Wakil Ketua	Pangidoan Silitonga, S.IP	
3.	Sekretaris	Desy Hartaty, SP	
4.	Anggota	1. Ismarlia Ikewati, ST 2. Indah Susanti, S.Kom 3. Hermansyah	
5.	Operator	1. Awaludin Septian 2. Muria Murdi Ningsih	

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS



MUHAMMAD ROZAK, SE
Pembina
NIP. 19720606 200501 1 008